

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 Juni 2021 – 18 Juni 2021 serta praktek secara langsung di Apotek Nifarma Sedati pada tanggal 22 Juni - 10 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan secara daring dan praktek yang dilaksanakan di Apotek Nifarma dapat memberikan wawasan mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan di apotek.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma, sebagai mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengetahui langsung permasalahan dan kondisi nyata yang terjadi dilapangan.
3. Calon Apoteker sebagai pekerjaan kefarmasian harus mampu menjaga kode etik profesi yang tertuang dengan peraturan perundang – undangan.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma dapat menjadi tempat belajar bagi calon Apoteker untuk berlatih dalam berkomunikasi langsung dengan pasien untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di dunia kerja nantinya.

5.2 Saran

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker secara daring dan praktek langsung di Apotek Nifarma adalah:

1. Dalam penataan di rak penyimpanan obat di Apotek Nifarma yang sudah di atur menurut bentuk sediaan obat, kelas terapi obat, berdasarkan abjad, generik dan pabrik obat yang mempermudah dalam pencarian dan pengambilan obat, tetapi sebaiknya perlu diberikan penandaan *LASA* dan *High Alert*.
2. Untuk memudahkan pengendalian stok obat sebaiknya dilakukan pemeriksaan stok obat secara berkala dengan ditinjau dari kartu stok.
3. Mahasiswa apoteker harus sudah menguasai kondisi lingkungan di apotek dan kompetensi apoteker dibidang pelayanan untuk memudahkan melakukan komunikasi dengan pasien, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas terkait pengobatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2008, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Drugbank, 2020, *Open Data Drug & Drug Target Database*, diakses pada 31 Juli 2021.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik*, Jakarta : Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2*, Jakarta : Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1*, Jakarta : Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1999, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3*, Jakarta : Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Mashuda, A., 2011, *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland
- Mims, 2021, The Monthly Index of Medical Specialities, terdapat di : <https://www.mims.com/indonesia> diakses pada 12 Juli 2021.
- Peraturan Kepala Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Kepala Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*, Jakarta : Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 068 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*, Jakarta: Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika*, Jakarta : Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 tahun 2011 tentang PBF*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Jakarta : Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Jakarta: Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta : Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi Edisi 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference* 36th Ed. Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.